

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN – PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA – PEDOMAN PELAKSANAAN

2022

PERBUP. PASURUAN NO. 108, BD 2022/NO. 108

PERATURAN BUPATI PASURUAN NO. 108 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara dan untuk menjamin objektivitas pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 94 Tahun 2021; PERPRES No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 76 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENPAN RB No. 27 Tahun 2021; PERMENPAN RB No. 28 Tahun 2021; PERMENPAN RB No. 29 Tahun 2021; PERMENPAN RB No. 20 Tahun 2022; KEPMENPAN RB No. 980 Tahun 2021; KEPMENPAN RB No. 981 Tahun 2021; PERATURAN BKN No. 14 Tahun 2018; PERATURAN BKN No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN No. 18 Tahun 2020; PERATURAN BKN No. 2 Tahun 2021.
- Maksud ditetapkannya Perbup ini adalah untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam pemerintah daerah serta menjamin kelancaran dan keseragaman proses pengadaan ASN yang dilaksanakan melalui penilaian/seleksi yang dilaksanakan secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam suatu jabatan. Sedangkan tujuannya adalah sebagai petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dan untuk menjamin kelancaran dan keseragaman proses pengadaan ASN. Yang diatur dalam Perbup ini adalah Perencanaan, Pengumuman Lowongan, Pelamar/Pendaftaran, Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian, Pembiayaan/Pendanaan, Monitoring dan Evaluasi serta ketentuan lain-lain.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 8 Juni 2022.